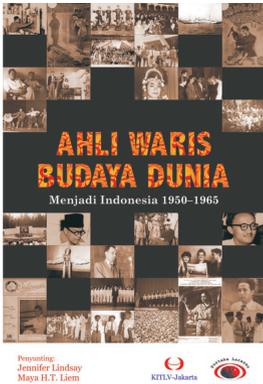


PROSES MENJADI INDONESIA DI BALI*

I Wayan Artika**



Judul : Ahli Waris Budaya Dunia, Menjadi Indonesia 1950-1965
Editor : Jennifer Lindsay & Maya H.T. Liem
Penerbit : KITLV-Jakarta dan Pustaka Larasan (Denpasar)
tahun : 2011
Tebal : 606 halaman

Buku ini memuat 18 artikel hasil karya sarjana dalam dan luar negeri tentang gerakan kebudayaan di Indonesia. Edisi bahasa Inggrisnya terbit lebih dahulu dengan judul *Heirs to World Culture: Being Indonesian, 1950-1965*. Inilah buku pertama yang cukup komprehensif dan representatif membahas dinamika kebudayaan Indonesia dalam konteks kehidupan sosial politik. Kontak Indonesia dengan dunia luar, terutama kalangan intelektual, dalam hal gerakan kebudayaan banyak dibahas, begitu juga misi kesenian dan kebudayaan Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk pencitraan bangsa yang waktu itu baru merdeka. Kehidupan-kehidupan seni budaya di beberapa daerah seperti Medan, Bali, dan Sulawesi Selatan juga dibahas sehingga tampil sebagai representasi kehidupan kebudayaan di

* Disampaikan dalam acara bedah buku *Ahli Waris Budaya Dunia, Menjadi Indonesia 1950-1965* di Bentara Budaya Bali, Jumat 16 Maret 2012 dan untuk keperluan publikasi telah melalui revisi.

**Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, karyasiswa S3 Linguistik, konsentrasi wacana sastra Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Email: batungsel@yahoo.com

luar Pusat dan atau hubungannya dengan Pusat.

Bali memiliki posisi menarik dalam konstelasi politik-kebudayaan dalam proses 'menjadi Indonesia' ini. Bukan saja, tim kesenian Bali selalu menjadi bagian penting dalam setiap misi kesenian bangsa yang dikirim ke luar negeri, tetapi juga fakta bahwa antara tahun 1950-1965 (yang merupakan periode pembahasan buku ini), dinamika kehidupan kesenian khususnya seni sastra dan seni pertunjukan sangat kental mendapat pengaruh politik. Sebelum buku ini terbit, dinamika kehidupan kebudayaan itu jarang disentuh. Kalau pun disentuh, umumnya hanya sebatas obrolan yang cepat menguap.

Tulisan Jenny Lindsay "Menggelar Indonesia di Luar Negeri" (hal 221-252) menunjukkan posisi Bali dalam sejumlah misi kesenian Indonesia ke mancanegara dan tulisan I Nyoman Darma Putra "Mulai Berbentuk; Budaya dan Nasionalisme di Bali 1950-1965" (hal 347-376) mengungkapkan sengitnya dinamika seni budaya dan politik di Pulau Dewata. Dari keduanya tampak bagaimana menjadi Indonesia di Bali.

Sejarah Politik vs Kebudayaan

Sejarah politik adalah satu-satunya sejarah yang pada umumnya dipelajari di sekolah. Sejarah tersebut kelak diharapkan mampu membentuk pandangan terhadap sejarah, misalnya bahwa sejarah itu monolitik dan bahkan diterima sebagai kebenaran tunggal. Pengajaran sejarah sekolah-sekolah di Indonesia telah menjadikan anak-anak bangsa menerima sejarah tanpa sikap kritis karena pengajarannya adalah bagian integral dari kegiatan politik penguasa. Hal itu melahirkan pandangan mengenai sejarah bahwa sejarah yang dipelajari di sekolah adalah satu-satunya suara kebenaran (yang dikonstruksi menurut kehendak rezim).

Sejarah juga memberi sumbangan untuk menjawab persoalan-persoalan sosial politik saat ini ketika berbagai persoalan sosial politik tidak terpecahkan. Kembali kepada

masa lalu untuk menemukan akar-akar persoalan masa kini di sana (dalam sejarah, pada masa lalu) merupakan pilihan yang bijak. Sayang sekali, pengajaran sejarah tidak sampai kepada terbinanya keyakinan siswa terhadap manfaat praktis sejarah seperti itu karena pengajaran hanya sampai kepada penyampaian informasi tentang fakta pada masa lalu kepada siswa.

Sejarah yang berpusat pada sejarah politik (sejarah nasional) melahirkan pandangan yang sempit. Memang banyak penelitian sejarah telah dilakukan oleh para ahli sejarah, dari sejarah kota hingga sejarah perkebunan kayu jati, namun hal itu jarang dibaca secara luas apalagi dimasukkan ke dalam pelajaran sejarah di sekolah. Buku *Ahli Waris Budaya Dunia, Menjadi Indonesia 1950-1965* mengkaji perkembangan budaya di Indonesia pada periode 1950-1965 dan buku ini menyatakan sikap tegas editornya bahwa kajian tersebut sama sekali bukan kajian budaya, kesenian, dan intelektual tetapi dalam kerangka yang jauh lebih besar yaitu peranan kebudayaan dalam bidang politik negara Indonesia karena "Kebudayaan sangat penting untuk memahami Indonesia pada zaman itu" (hlm. 7). Sejalan dengan hal itu, walaupun "Republik dalam keadaan kisruh" pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres Kebudayaan yang pertama di Magelang.

Republik Indonesia dalam periode lima belas tahun tersebut sesungguhnya tidak hanya berjuang di bidang politik tetapi juga dalam bidang kebudayaan. Banyak tokoh dikisahkan dalam perjuangan kebudayaan dalam buku ini (penari, penerjemah, sutradara, penulis, pemusik, dan intelektual). Jika sejarah politik ORBA, misalnya, memojokkan D.N. Aidit, melalui pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) pada dekade 1980-an dan film yang menggambarkan kejahatan PKI, maka salah satu kontributor dalam buku ini, Michael Bodden, mengemukakan bahwa tokoh ini memiliki perhatian terhadap seni drama (hlm. 498). Diungkapkan bahwa menurut D.N.

Audit, drama-drama realis revolusioner harus memiliki kualitas artistik yang tinggi, mengikuti garis partai, mengangkat tema-tema perjuangan rakyat kecil, merakyat (sederhana dan mudah dipahami oleh rakyat), tidak menggunakan properti yang *ribet*, dan bisa dipertunjukkan di panggung terbuka agar dapat ditonton oleh sebagian besar rakyat.

Seni menyanyi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan kebudayaan. Menurut Sudharnoto (ketua Lembaga Musik Lekra), musik berfungsi membina kebudayaan nasional dan melawan kebudayaan Amerika (imperialis). Selain sebagai senjata untuk memabat lawan-lawan Revolusi, musik (nyanyian) juga menempati posisi garda depan diplomasi antarnegara senasib sepenanggungan (hlm. 474). Sejalan dengan diplomasi Indonesia ke luar negeri lewat jalan kebudayaan, penulis lain dalam buku ini, Irawati Durban Ardjo menulis, "Dalam waktu tiga bulan itu kami berkeliling menebarkan keindahan seni Indonesia untuk mendapat simpati dunia bagi negara yang masih muda" (hlm. 448). Tarian memiliki peranan sangat penting dalam kerangka "menjadi Indonesia" atau "indonesianisasi" (Irawati Durban Ardjo, hlm. 457). Masyarakat Bali pada umumnya tidak mengetahui bahwa tari *Tenun* adalah hasil "indonesianisasi" di bidang tari. Tari ini diciptakan dalam rangka menyediakan tarian-tarian Indonesia yang kontras dengan tarian-tarian daerah yang telah ada dalam tradisi.

Arus utama buku ini adalah mengkaji sejarah kebudayaan dalam kerangka kehidupan politik nasional (pada umumnya dikerjakan oleh negara atau partai politik) tetapi apakah gunanya membicarakan produksi dan pembacaan budaya pop dan roman picisan di Medan (hlm. 417), sebagai salah satu kajian Marije Plomp. Apakah gunanya pula membicarakan produksi dan kegiatan menonton pertunjukan-pertunjukan drama di Malang, khususnya di kalangan orang Tionghoa, yang disponsori oleh GAPERO (Gabungan Perusahaan Rokok) seperti kajian Melani Budianta (hlm. 287-315)? Kajian Marije Plomp tentang keadaan

budaya di Medan dan kajian Melani Budianta tentang kehidupan kebudayaan di Malang mengindikasikan bahwa kebudayaan juga digunakan untuk hiburan belaka. Dalam ruang lingkup (sebagian pada kajian Marije Plomp dan Melani Budianta) kita diajak melihat kebudayaan bukan dalam kerangka "menjadi Indonesia". Dua kajian tersebut menegaskan bahwa kesenian yang sering diidentikkan dengan kebudayaan juga tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang lebih murni: sebagai hiburan bersama.

Dalam sejarah politik, Jakarta tidak serta merta diterima sebagai pusat politik yang legal. Karena sejarah politik melakukan generalisasi maka Jakarta sebagai pusat politik diterima secara aklamasi di seluruh Indonesia atau diterima bahwa Indonesia merdeka tepat sejak tanggal 17 Agustus 1945. Kenyataannya tidak demikian. Menurut Jennifer Lindsay penerimaan 17 Agustus 1945 sebagai hari merdeka bagi Republik Indonesia hanyalah mitos (hlm. 2). Ia menemukan tugu kecil di alun-alun Kota Banda Neira. Pada tugu itu dipahatkan, Indonesia baru merdeka tanggal 27 Desember 1949, ketika Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dan memperoleh pengakuan secara internasional (lihat pula Ricklefs 2005). Dalam kajian Marije Plomp disebutkan bahwa Jakarta tidak sebagai pusat kebudayaan tetapi Singapura (hlm. 429). Hasil kajian Jennifer Lindsay dan Marije Plomp menunjukkan adanya mitos dalam sejarah dan lawan-lawan mitos itu tidak diberi tempat dalam sejarah yang bersifat otoriter. Kajian-kajian di luar sejarah yang bersifat otoriter harus ditemukan oleh masyarakat dalam kerangka memahami sejarah secara lebih luas dan menerima mitos-mitos sejarah secara kritis.

Nyanyi, musik, tari, sastra, dan teater pada periode 1950-1965 mengandung muatan politik yang sangat kuat. Dua kajian mengenai teater dalam buku ini (Michael Bodden dan Barbara Hatley) menunjukkan keadaan itu. Teater di Medan dan Makassar tumbuh di bawah kekuatan partai. Kegiatan budaya di

Indonesia pada periode 1950-1965 tidak terlepas dari persaingan partai politik, yang dibuktikan oleh adanya organisasi atau lembaga kebudayaan di bawah partai tertentu. Persaingan LKN dan Lekra di Bali sejalan dengan persaingan dua partai berpengaruh yaitu PKI dan PNI. Hal ini diungkapkan dalam tulisan I Nyoman Darma Putra (hlm. 359). Menurut Darma Putra, konflik yang kian tajam antara PKI dan PNI semakin mempersengit ketegangan antara Lekra dan LKN.

Kajian terhadap *Mimbar Indonesia*, media yang berperan mewadahi pergolakan pemikiran dan intelektual, oleh Els Bogaerts menjelaskan bahwa kajian media dapat dilakukan dalam dua hal: (1) mengkaji isi media tersebut dan (2) mengkaji kehidupan media tersebut sebagai media. Sejarah umum mengkaji media dengan memperlakukan media hanya sebagai sumber data.

Kajian-kajian dalam buku ini mengemukakan pandangan yang sama, yang diwakili oleh pandangan Jennifer Lindsay (hlm. 226). Kebudayaan pada era Presiden Soekarno digunakan untuk mengekspresikan rasa percaya diri dan kebanggaan bangsa (dalam rangka "menjadi Indonesia"). Hal ini misalnya dilakukan melalui pengiriman misi kebudayaan ke luar negeri. Menurut Jennifer Lindsay, perdebatan kesenian bangsa yang terpolitisasi yang pernah sengit, kini sepi (hlm. 252). Apakah setelah 1965 pemerintah Republik Indonesia mengabaikan peranan kebudayaan? Atau, kebudayaan telah dikodifikasi oleh kalangan kapitalis?

Hubungan bangsa Indonesia dengan dunia luar tidak hanya melalui hubungan diplomatik, olah raga, perhelatan budaya ke luar negeri tetapi juga melalui kerja para penerjemah. Kajian H.T. Liem mengenai kegiatan penerjemahan pada periode 1950-1965 menyadarkan bahwa peran penting para penerjemah yang selama ini dilupakan. Penerjemahan adalah suatu jalan untuk memperluas wawasan masyarakat Indonesia dan untuk mengenal alam pikiran bangsa lain (hlm. 199). Kajian Hong Liu

menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Cina lebih didasari oleh kesamaan ideologi (Komunis). Pada konteks ini PKI melalui Lekra secara intensif melakukan kontak kebudayaan dengan Cina.

Banyak Masa dalam Satu Masa

Buku ini bukan kajian sejarah kebudayaan, tetapi melihat sejarah bangsa Indonesia dari segi budaya (hlm. 3), khususnya periode 1950-1965. Masa ini adalah banyak masa di dalam satu masa: dekolonisasi, peralihan dari federalisme ke kesatuan, konflik kedaerahan (maraknya gerakan separatisme/gerombolan bersenjata), demokrasi konstitusional, faksionalisme politik, pemerintahan otokratis, hubungan-hubungan internasional, merosotnya ekonomi, intervensi-intervensi perang dingin.

Beberapahal yang perlu dikemukakan antara lain popularitas Lekra pada periode 1950-1965, tindak lanjut kajian yang terbuka luas sejalan dengan topik buku ini, dan efek sejarah yang ditimbulkan oleh buku ini. Popularitas Lekra dalam periode ini (yang tampak melalui banyaknya kajian mengenai Lekra dalam buku ini) menunjukkan bahwa Lekra memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap kebudayaan. Hal itu terbukti dengan tersedianya bahan-bahan melimpah mengenai kiprah Lekra karena penelitian tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan data yang memadai. Buku ini membuka peluang baru penelitian di bidang kebudayaan. Sumbangan buku ini sejalan dengan efek sejarah terhadap pembaca, yaitu mengajak melakukan perbandingan secara diakronik dalam bidang budaya: masa kini dan masa silam. Pada masa kini budaya adalah budaya media (televisi). Budaya di media adalah referensi masyarakat. Budaya media saat ini adalah budaya yang dikemas sebagai barang dagangan. Pemerintah mengukur kemajuan budaya secara ekonomi (industri kreatif). Panggung budaya media adalah panggung budaya global, panggung ekspor dan impor budaya. Pada masa ORBA budaya adalah media kritik terhadap

pemerintah yang otoriter. Budaya dipilih sebagai media karena demokrasi tidak berjalan. Setelah reformasi ketika kebebasan mengeluarkan pendapat terbuka lebar, "panggung" budaya tidak lagi digunakan untuk menyatakan kritik.

Buku ini merintis penelitian yang lebih holistik dalam rangka menghindari pengkotakan bidang-bidang penelitian budaya. Teori New Historicism (yang juga disinggung dalam buku ini), misalnya dapat memberi peluang untuk mempelajari sejarah dan membaca dokumen-dokumen kebudayaan pada periode tersebut. Tulisan-tulisan di dalam buku ini saling mengacu karena itu tulisan-tulisan tersebut saling menunjang. Bidang-bidang budaya atau pengkotak-kotakan budaya amat dihindari dalam buku ini. Pada masa depan, peneliti-peneliti budaya seharusnya bisa bekerja sama dalam menyelenggarakan penelitian karena pada kenyataannya budaya yang hidup di tengah masyarakat saling berhubungan dan budaya adalah peristiwa interteks (interteks budaya).